

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN
PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah
BiMU Bandar Lampung)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

NURELITA

NPM.1451020095

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN
PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah
BiMU Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Perbankan Syariah**

Oleh

Nurelita

NPM. 1451020095

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama. Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak yang meminjam dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu. Apapun jenis produk pembiayaan yang disalurkan pasti memiliki sebuah risiko yang dihadapi. Risiko pada Lembaga Keuangan yang terjadi diantaranya adalah pembiayaan bermasalah. Risiko tersebut dapat dicegah dengan cara melakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum pembiayaan dikabulkan atau dicairkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung. Dan Bagaimana Pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya: Dalam pelaksanaan pembiayaan Konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya. Dalam pemberian pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi seperti pembelian motor, mobil, rumah, alat elektronik, pendidikan, dll. Dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BTM BiMU menggunakan prinsip 5C. Dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek yuridis.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

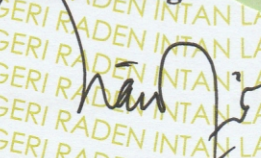
**Judul skripsi : ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN
PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSEPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil
Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)**

Nama : Nurelita
NPM : 1451020095
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I



Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001

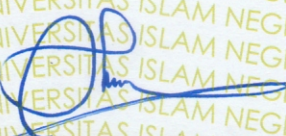
Pembimbing II



Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung).** Disusun oleh : **Nurelita, NPM. 1451020095, Jurusan: Perbankan Syariah,** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: **Selasa/04 September 2018.**

DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

Sekretaris : Liya Ermawati, M.S.Ak

Penguji I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.dev

Penguji II : Hanif, S.E., M.M.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Mof. Bahrudin, M.A.
NIP. 195808241989031003

MOTTO

﴿يَلْبَسِي ۖ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ۝ ٣١﴾

“...Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

(Al-A'raf [7] : 31)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Depag Ri, 2005), h. 232.

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada-Mu ya Allah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Alm. Martiyas dan Ibunda Erlina, terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian doa-doa yang tak pernah henti, dukungannya, serta kasih sayang tidak pernah putus di setiap langkah ku, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada Ayah Dan Ibuku.
2. Uni ku tersayang Nur Yeliza terima kasih atas semua kasih sayang, bantuan, semangat, dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Kakak Ipar ku Ridho Pangestu terimakasih atas kasih sayang, bantuan, semangat, dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kemudahan.
3. Keluarga besarku yang selalu menanti-nantikan kelulusanku untuk menjadi seorang sarjana.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya kelas C, terima kasih atas segala support yang telah diberikan secara sadar maupun tidak sadar.
5. Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nur Elita dilahirkan di Seputih Mataram Lampung Tengah, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 1996. Anak kedua dari dua bersaudara, pasangan dari Alm. Bapak Martiyas dan Ibu Erlina. Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Gula Putih Mataram (TK GPM) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Lalu melanjutkan di Sekolah Dasar Gula Putih Mataram (SD GPM) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Terbanggi Besar dari tahun 2008 dan lulus tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Tengah dari tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Perbankan Syariah melalui jalur (SPAN-PTAIN) UIN Raden Intan Lampung tahun ajaran 2014/2015.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, dan para pengikut-Nya, semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Aamiin

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih melalui tulisan ini kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa mengayomin mahasiswanya.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung mahasiswanya dalam mengerjakan skripsi.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M. sebagai pembimbing utama terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I. sebagai pembimbing kedua yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Kedua orang tuaku Ayahanda Alm. Martiyas dan Ibunda Erlina, terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian doa-doa yang tak pernah henti, dukungannya, serta kasih sayang tidak pernah putus di setiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada Ayah Dan Ibuku.
6. Untuk Uni ku Nur Yeliza dan kakak ipar ku abang Ridho Pangestu yang senantiasa memberikanku support, doa, dan selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Ratu Desta, Firstella Apnizar, Bella Suciati Agami, Martin Fajar Sukma, Siti Wulandari, Tia Destiana, Anisa Roziana, Rima Puspita yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan canda tawanya. Bersama kalian, masa-masa kuliah terasa menyenangkan.
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas C angkatan 2014, terimakasih telah mengenal dan menjadi sahabat kalian semua membuat hari-hariku menjadi penuh makna semoga masa kuliah yang telah kita lewati akan menjadi cerita dan kenangan terindah dalam hidup ini.

9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang insya Allah dapat menjadi pedoman dan bekal untuk penulis.
10. Untuk KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung serta staf-stafnya yang telah membantu dalam mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya.

Bandar Lampung, 27 Juni 2018

Penulis

NUR ELITA

NPM.1451020095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	21
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	23
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	24
4. Tujuan Pembiayaan	25

5. Fungsi Pembiayaan	28
6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan	30
B. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan	32
C. Pembiayaan Konsumtif	41
D. Murabahah.....	44

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU	
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BTM BiMU	49
2. Visi dan Misi KSPPS BTM BiMU	51
3. Logo & Makna KSPPS BTM BiMU	52
4. Lokasi KSPPS BTM BiMU	54
5. Job Deskripsi KSPPS BTM BiMU	55
6. Alamat kantor KSPPS BTM BiMU	59
7. Tujuan Pembiayaan KSPPS BTM BiMU	61
8. Produk - Produk KSPPS BTM BiMU	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif Pada BTM BiMU	69
B. Pembiayaan Konsumtif Dalam Persepektif Ekonomi Islam	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan	25
4.1 Bagan Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum kita sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan dapat menghindari kesalah pahaman pengertian dikalangan pembaca, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kerangka, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab atau duduk perkaranya).¹
2. Standar, adalah ukuran atau tingkat biaya hidup, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dipakai sebagai ukuran nilai (harga), ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

² Hamzah Ahmad, Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 351.

3. Kelayakan Pengajuan Pembiayaan, adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal yang diajukan nasabah.³
4. Pembiayaan Konsumtif, adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.⁴

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi “Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung untuk kebutuhan yang tujuannya di luar usaha. Rentan akan resiko yang akan berakibat pada kredit atau pembiayaan bermasalah bahkan macet, sehingga dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis kelayakan pengajuan pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai kemampuan dan kesediaan nasabah mengembalikan pembiayaan yang

³ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 67.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 61.

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan di awal.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan dalam judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis, yaitu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan tersedianya referensi data atau informasi yang penulis butuhkan terkait dengan judul yang diteliti, baik informasi langsung dari KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung maupun perpustakaan serta media lainnya sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.⁵ Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh

⁵ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Kharisma Putrautama Offset, 2013), h. 1.

lembaga keuangan. Di Indonesia dikenal dua jenis sistem keuangan, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.⁶

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) disebut juga dengan *non-depository financial institution (non-deposit taking)* adalah lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatannya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, leasing, anjak piutang, modal ventura, dan pegadaian serta perusahaan pembiayaan lainnya.⁷

Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pembiayaan konvensional dan syariah yang dapat ditemui hampir di setiap kota di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), Baitut Tamwil Muhammadiyah termasuk pada lembaga keuangan mikro bank yang bersifat informal, disebut informal karena keberadaan Baitut Tamwil Muhammadiyah tidak memerlukan legitimasi formal dari pemerintah yang terkait.⁸

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N, *Bank And Financial Institution Management* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2007), h. 18.

⁷ *Ibid.* h. 18.

⁸ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 43.

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan.¹⁰ Karena pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan yang tujuannya di luar usaha maka rentan akan resiko. Banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang pekerjaan calon nasabah sehingga banyak terjadi masalah dalam pemberian kredit atau pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu lembaga keuangan memerlukan suatu pengelolaan resiko yang komprehensif, sistematis, dan transparan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa.¹¹ Untuk menjalankan suatu kegiatan, kebutuhan akan dana bersifat mutlak. Tidak akan mungkin kegiatan tersebut akan berjalan lancar tanpa adanya dana. Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan dana tersebut ialah melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dana sendiri. Dalam menyalurkan dananya, pihak bank maupun non bank memiliki syarat tertentu yang harus

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92.

¹⁰ Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Liquidity*, 2017, h. 33.

¹¹ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 69.

dipenuhi seperti jenis pembiayaan yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian pinjaman, jaminan yang dimiliki, dan persyaratan lainnya.¹²

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹³

Salah satu ajaran Al Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Al Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra' [17] : 34 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 270-271.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”* (Al-Isra’ [17] : 34)

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Al-Quran telah menjelaskan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi dari Allah SWT.¹⁴

Dalam pemberian pembiayaan diperlukan analisa kelayakan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan tujuan agar lembaga tersebut yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Lembaga keuangan harus lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat, agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Risiko timbul karena adanya ketidak pastian yang berarti kondisi itu menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang.¹⁵

Pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko besar yang berakibat pada

¹⁴ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Tori Ke Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.3.

¹⁵ Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, “Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang)”. (*Skripsi* Program Studi D3 UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016), h. 3.

pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank. Pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan atau kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.¹⁶ Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan kepada anggota BTM, maka BTM harus merasa yakin pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak mengalami risiko fatal seperti anggota tidak membayar angsuran perbulan yang di awal sudah ada kesepakatan antara pihak BTM dan anggota.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter, kapasitas/kemampuan, modal, kondisi, jaminan.¹⁷ Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang tersalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁸

Melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan adalah penerapan prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan itu sendiri adalah

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.86.

¹⁷ *Ibid.* h. 372.

¹⁸ Ismail, *Op. Cit.* h. 120.

kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui oleh nasabah yang akan dibiayai oleh KSPPS.¹⁹ Walaupun sudah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung tetapi masih ada yang bermasalah. Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak yang meminjami dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu. Pembiayaan yang mengalami penunggakan ini harus ditangani dengan cara dipantau, agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung memiliki prosedur serta penilaian kelayakan yang teliti untuk seorang nasabah mengajukan pembiayaan, sehingga akan menekan terjadinya pembiayaan bermasalah untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung).”**

¹⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 91.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang wawasan mengenai standar kelayakan pembiayaan dan prosedur pengajuannya, dan untuk mengetahui bagaimana kelayakan nasabah yang patut menerima fasilitas pembiayaan, untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang.

b. Bagi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran baik berguna untuk bahan rujukan maupun pertimbangan terutama mengenai hal standar kelayakan pembiayaan.

c. Bagi Dunia Pustaka

Diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai Perbankan Syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Farhani yang berjudul Analisis kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat) penelitiannya menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan yang dilakukan pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat tersebut bersifat kualitatif dan bank muamalat menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Akan tetapi ada sedikit permasalahan dari segi *Capital*, yang belum tercukupi. Pada akhirnya Koperasi Karyawan Bank Muamalat belum terlalu lancar dalam menyalurkan pembiayaannya.²⁰
2. Penelitian terdahulu Irkhalia Zakiyani yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS Binama Semarang sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan lainnya mulai dari melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi,

²⁰ Firman Farhani, “Analisis kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat)”. (*Skripsi Program Studi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015*).

pemutusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. Di BMT tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan aspek 5C, yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) tetapi prinsip yang paling penting adalah penilaian pada *Character, capacity, Collateral*.²¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Rizky Uswatun Khasanah yang berjudul “Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang menggunakan akad ijarah. Analisis dalam menilai kelayakan nasabah pada pembiayaan konsumtif ini menggunakan prinsip 3C saja untuk menilai kelayakan nasabah yaitu: *Character, Capital, Collateral*.²²

Meskipun judul ini pernah diteliti sebelumnya tapi penelitian ini memiliki beberapa berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang membedakannya adalah pada obyek penelitian, akad yang digunakan serta jenis pembiayaan yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan berbeda, namun lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan standar kelayakan

²¹ Irkhalia Zakiyani, “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)”. (*Skripsi*, Program Studi D3 UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015).

²² Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, “Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang)”. (*Skripsi* Program Studi D3 UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016)

pembiayaan yang hampir sama, guna memperoses pengajuan pembiayaan nasabahnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian naturalistik yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan peran pembiayaan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 8-9.

diamati.²⁴ Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai analisis pembiayaan konsumtif yang dilihat dari persepektif ekonomi Islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pulau Tegal No. 17 RT. 06 LK 2 Kelurahan Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Telep. (0721) 702466 / 8011229.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁵

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terkait di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung seperti pimpinan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 3.

²⁵ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 171.

lembaga serta karyawan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang didapat untuk mendukung kelengkapan data yang didapat dari data primer. Data skunder pada penelitian ini berasal dari KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan profil lembaga dan kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk membeikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian.²⁶

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam

²⁶ Lexy. J. Moelong, *Op. Cit*, h. 132.

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.²⁷

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel, maka dari itu penelitian ini tidak menggunakan teknik populasi dan sampel karena penelitian ini menggunakan subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan dari KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.²⁸ Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti meninjau langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan di lapangan.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

²⁷ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 216.

²⁸ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 133-134.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada kepala KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung, kabag legal, *Manager Marketing*, *Manager Area*, *personalia*/SDI, *Kadiv Marketing* dan karyawan-karyawan BiMU. Untuk mendapatkan informasi bagaimana pembiayaan konsumtif dan prosedur pengajuannya serta bagaimana menilai standar kelayakan pengajuan pembiayaan pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan data yang di dapatkan dari KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar lampung yang meliputi: arsip, dokumen resmi dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

6. Teknik pengolahan data

a. Editing

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat

²⁹ Sugiyono, *Op. Cit.* h. 137.

dipersiapkan untuk proses lebih lanjut ataukah rekaman tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut.³⁰ Kegiatan pemeriksaan hasil rekaman data lapangan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data, proses penyaringan data pertama ini merupakan kunci apakah data yang telah diperoleh tersebut mampu memberikan penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan untuk keperluan pembuktian suatu masalah atau fenomena yang diamati, ataukah hal yang sebaliknya terjadi.³¹

b. Penemuan hasil

Dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai fakta yang telah ditemukan, yang pada akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

7. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode yang telah ditentukan. Fakta yang dikumpul adalah penilaian KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dalam menentukan layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan konsumtif dan bagaimana penilaian tersebut

³⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 173.

³¹ *Ibid.* h.174.

mempengaruhi keputusan pihak KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung untuk menerima atau menolak anggota yang mengajukan pembiayaan konsumtif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain (debt)*. Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan

¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 3.

² Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), h. 700

yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan.

Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *ijarah mutahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.

³ *Ibid.* h. 700-701

- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.⁴

2. Dasar Hukum Pembiayaan

- a. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa [4] : 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya : “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Nisa [4]: 29)

- b. Dalam Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

⁴ Ibid. h. 700-701.

Artinya: *“Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya”*.(HR Ath_Thabrani).

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

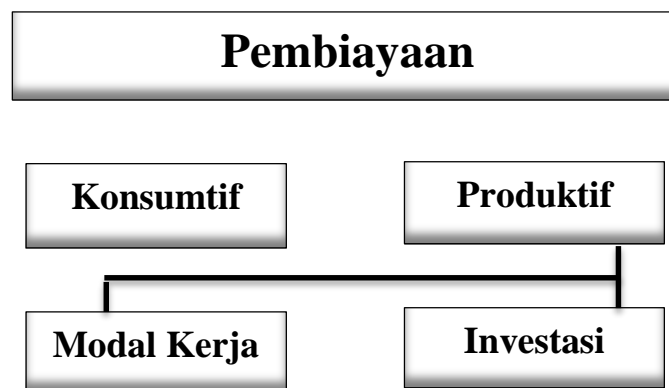
⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160-161.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁶

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Jenis-Jenis Pembiayaan



4. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah

⁶ *Ibid.* h. 160-161.

diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁷

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Bank (Selaku Mudharib atau Shahibul Maal)

- a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.

⁷ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Op. Cit.* h. 711.

⁸ *Ibid.* h. 711-712

- b. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
- c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
- d. Sebagai salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan pada *customer*.
- e. Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- f. Sebagai salah satu komponen dari aset allocation approach.

2) Nasabah (Selaku Shahibul Maal atau Mudharib)

- a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
- b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
- c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

3) Negara (Selaku Regulator)

- a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
- b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- d. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
- e. Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN)

yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya :

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank atau KJKS dalam bentuk tabungan atau deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan, produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan lembaga keuangan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang

tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari lembaga keuangan berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu keinginan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara salah satunya berwirausaha. Karena itu pulalah maka pengusaha akan mungkin memperoleh bantuan permodalan untuk peningkatan usahanya. Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilaman masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sdemikianrupa meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap uasaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak

perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting

6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

- a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti:
 - 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP.
 - 2) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
 - 3) Keterangan mengenai pekerjaan.
 - 4) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
 - 5) Specimen tanda tangan.

- b. Mengumpulkan data diri berupa foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto copy kartu keluarga.
- c. Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.
- d. Foto copy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.
- e. Foto copy BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto copy sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:

- a. Mewawancarai nasabah/anggota.
- b. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
- c. Melakukan negoisasi.
- d. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota.
- e. Melakukan dokumentasi secara layak.
- f. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.⁹

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.302.

B. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan

Standar kelayakan Pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang diberikan pembiayaan itu layak atau tidak diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹⁰

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119-120.

menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹¹

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisis 5C, yang meliputi:

1) *Character* (Karakter)

Analisis penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.¹²

Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Verifikasi data dengan melakukan interview
- c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
- d. Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
- e. Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada

¹¹ *Ibid.* h. 120.

¹² Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 67.

- f. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.¹³

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.¹⁴ Untuk mengukur *Capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- b. Pendekatan *profesi*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja sumber bahan baku,

¹³ *Ibid.* h. 68.

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 145.

peralatan/mesin-mesi, administrasi keuangan, *industry relation* hingga kemampuan merebut pasar.¹⁵

3) *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin.

Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
- b. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.¹⁶

4) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran, usaha sejenis dan lain-lain.

Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

¹⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.* h.68.

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.* h. 146.

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
- d. Prospek usaha dimasa yang akan datang
- e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.¹⁷

5) *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah.¹⁸

Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut.

- a. Segi Ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan digunakan.
- b. Segi Yuridisi, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridisi untuk dipakai sebagai agunan.¹⁹

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam

¹⁷ *Ibid.* h. 146-147.

¹⁸ *Ibid.* h. 147.

¹⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.* h. 69.

analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan.²⁰

Selain menggunakan prinsip 5C ada prinsip lain yang juga bisa digunakan untuk menganalisis suatu kredit atau pembiayaan, dengan prinsip 7P analisis pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut.²¹

a. *Personality*

Personality atau kepribadian yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya, masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

b. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula di bank. Hal ini dilakukan agar lembaga keuangan lebih fokus dalam menangani pembiayaan tersebut.

c. *Purpose*

Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

²⁰ Ismail, *Op. Cit.* h. 126.

²¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 96-

Seperti diketahui bahwa tujuan untuk mengambil pembiayaan ada tiga yaitu: pertama, untuk usaha yang produktif, kedua, untuk digunakan sendiri (konsumtif) ketiga, untuk perdagangan. Oleh karena itu, jangan sampai pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank disalahgunakan oleh nasabah.

d. *Payment*

Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar pembiayaannya atau tidak.

e. *Prospect*

Prospect yaitu melihat usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah sebaiknya ditunda karena akan menyulitkan lembaga keuangan dan nasabah nantinya.

f. *Profitability*

Profitability yaitu pembiayaan yang dibiayai oleh lembaga keuangan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Jika tidak, sebaiknya jangan diberikan. Keuntungan bagi lembaga keuangan tentunya adalah berupa balas jasa yang diberikan nasabah dari bagi hasil. Sebaiknya bagi nasabah adalah

berkembangnya usaha yang dibiayai yang pada akhirnya adalah keuntungan dan adanya tambahan modal.

g. *Protection*

Protection yaitu bertujuan untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu, seperti asuransi kematian dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan, seperti halnya proses pemberian kredit oleh bank konvensional. Ada 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan, tahapan ini disebut tahap analisis pembiayaan.
- b. Tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan ke dalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- c. Tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai

dibuat serta digunakan oleh nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.

- d. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah, yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Menurut Muhammad Syafii Antonio, bahwa tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk meyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan hal-hal pokok yaitu :

- a. Apakah obyek pembiayaan itu halal atau haram
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian
- d. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal
- e. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung

Sedangkan Zaenul Arifin, menekankan bahwa perlunya bank syariah berhati-hati pada saat akan memberikan pembiayaan pada nasabah. Oleh karena itu, bank syariah atau KJKS harus menghindari hal-hal berikut ini:

- a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- b. Usaha yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (*gharar*)

- c. Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai
- d. Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedang aparat bank tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut.
- e. Pengusaha yang bermasalah.

C. Pembiayaan Konsumtif

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.²²

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi ataupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan,

²² Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 244.

pariwisata,hiburan dan sebagainya.²³ Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Pembiayaan konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan *supply*.²⁴

Fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²⁵ Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti: pembelian sepeda motor, pembelian komputer, laptop, pembelian mesin cuci, kulkas, televisi, dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syari'ah.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 168.

²⁴ Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Liquidity*, 2017, h. 33.

²⁵ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Op. Cit.* h. 683-685.

kebutuhan tersebut. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di bank syariah, pemberian konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:²⁶

1. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
2. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)
3. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
4. Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna*
5. Pembiayaan Konsumen Akad *Qard* dan *Ijarah*.

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam menetapkan pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:²⁷

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

²⁶ Adiwarman A, Karim, *Op. Cit.* h. 244.

²⁷ *Ibid.* h. 244.

D. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam istilah ilmu fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁸ Dengan kata lain *murabahah* berarti jual beli barang ditambahkan keuntungan yang disepakati yang mana pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Menurut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* yaitu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁹ Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.

Menurut PSAK 102 Akutansi *Murabahah* , paragraf 5 menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 81-82.

²⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 158.

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.³⁰

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Dalam Al-Quran Surat Al Baqarah [1] : 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi lagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Al Baqarah [1] : 275)

³⁰ *Ibid*, h. 158.

- b. Dalam Hadis Nabi riwayat Jumai':

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ
عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ
وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Dari Jumai’ bin Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda : “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah. Tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya” (H.R.Ahmad nomor 15276)

3. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³¹

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- c. Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

³¹ Ascarya, *Op. Cit*, h. 82.

4. Syarat *Murabahah*

Beberapa syarat dari akad *murahah* antara lain sebagai berikut:³²

- a. Syarat yang berakad (*ba'i* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*Ijab* dan *Qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

5. Jenis-Jenis *Murahah*

Murahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini berlaku pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *Murahah*. *Murahah* memiliki 2 jenis yaitu:³³

- a. *Murahah* tanpa pesanan yaitu ada pembeli atau tidak adanya pembeli bank syariah menyediakan barang.
- b. *Murahah* berdasarkan pesanan yaitu bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesan barang.

Murahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

³² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, h. 147.

³³ Ascarya, *Op. Cit*, h. 89.

- a. Sifatnya mengikuti yaitu, *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pesanan.
- b. Sifatnya tidak mengikat yaitu walaupun nasabahnya telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun 2004 dengan nama Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung, namun sesuai dengan peraturan Kemenkop, pada RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.

Baitul Tamwil memiliki arti yang diambil dari dua suku kata yaitu Bait yang berarti bangunan atau rumah dan at- Tamwil yang berarti pengembangan harta, jadi Baitul Tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.

Sebagai amal usaha, BTM tumbuh dan berkembang dibawah binaan PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM lampung. Pada mulanya BTM mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah BTM menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan khususnya pembiayaan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (Bagi Hasil). Hal Ini ditandai dengan mulainya kegiatan pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional Way Halim-Bandar Lampung. Keberadaan BTM diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak da'wah *bil hāl* Muhammadiyah Lampung.¹

Secara kelembagaan, KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU berdiri dengan badan hukum Koperasi

Badan Hukum : No. 024/BH/DKPKPM/X/2005

Akta Pendirian : No. 11 Tanggal 09 Agustus 2005

(Notaris Budi Kristiyanto, S.H)

Akta Perubahan : No. 78 Tanggal 16 Desember 2010

(Notaris Budi Kristiyanto, S.H)

¹ Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dicatat tanggal 15 Mei 2018 pukul 09:15 WIB.

Akta Perubahan : No. 02 Tanggal 01 Juni 2011

(Notaris Budi Kristiyanto, S.H)

Akta Perubahan : No. 21 Tanggal 26 Oktober 2016

(Notaris TB. Lukman Suheru, SH)

SIUP : No. 1082/510/5/PK/XI/2007

SITU : No. 1458/II/E/TKP/2007

TDP : No. 070126500313

NPWP : No. 02.707.215.6-322.000

2. Visi Dan Misi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

Visi :

“Menjadi Koperasi Syariah Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah”

Misi :

- a. Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan sistem ekonomi syariah.
- b. Menyajikan produk-produk transaksi syariah yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

- c. Memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel kepada anggota.
- d. Melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang lembaga keuangan syariah, mampu berkompetisi dan berakhlakul karimah.
- e. Mengembangkan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam meningkatkan perekonomian ummat.
- f. Mendasarkan setiap aktivitas pada tata kelola yang akuntabel.²

3. Logo & Makna KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

Logo :



Logo KSPPS BTM BiMU memiliki ciri khas berbentuk matahari yang memancarkan 12 sinar hijau yang mengarah keseluruhan penjuru dan ditengahnya terdapat logo Koperasi Indonesia. Nama KSPPS BTM Bina Maryarakat Utama dan Badan Hukum Pertama terletak melingkar mengelilingi logo Koperasi Indonesia.

² Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dicatat tanggal 15 Mei 2018 pukul 09:15 WIB.

Berikut pengertian Logo BTM BiMU :

- a. Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, BTM BiMU diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.
- b. Dua belas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semangat BTM BiMU dalam memperjuangkan ekonomi syariah, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa SAW yang berjumlah 12 orang).
- c. Matahari dengan 12 sinar merupakan logo Muhammadiyah yang bermakna BTM BiMU menjadi garda terdepan dalam mendukung gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah.
- d. Warna hijau melambangkan kedamaian dan kesejahteraan.³

Nilai-nilai yang mendasari budaya kerja pada BTM BiMU Bandar Lampung adalah IHSAN :

- a. *Integrity* : Berpikir, bertindak terpuji dan menjadi teladan
- b. *Humanity* : Menjaga dan menjunjung tinggi persaudaraan, kemanusiaan dan mewujudkan masyarakat berkeadilan yang religius

³ Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dicatat tanggal 15 Mei 2018 pukul 09:15 WIB.

- c. *Spirituality* : Berikhtiar meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keyakinan yang sempurna
- d. *Accountability* : Tata kelola usaha yang terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan
- e. *Network* : Memperluas jaringan usaha dan meningkatkan mutu layanan

Motto : *“Melayani Sepenuh Hati Menggapai Ridho Illahi”*

4. Lokasi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

- a. Lokasi penelitian adalah di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pulau Tegal No. 17 RT. 06 LK 2 Kelurahan Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.
- b. Kode Pos: 35133.
- c. Telepon: (0721) 702466 / 8011229 (*setiap jam kerja*)
- d. Email: kjksbtm.bdl@gmail.com
- e. Website: <http://btmbimu.id/>

5. Job Deskripsi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

Adapun Job Deskripsi kepengurusan KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung yaitu:⁴

a. PENGAWAS

- 1) Ketua : Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

Memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainnya di BTM BiMU dengan syariat Islam sebagai dasar pedoman operasional BTM BiMU.

- 2) Anggota : Hi. Nurvaif S. Chaniago

Menjalankan tugas dengan cara memberikan penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan dalam transaksi-transaksi yang terjadi pada BTM BiMU.

b. PENGURUS

- 1) Ketua : Ir. Jamhari Hadipurwanta, M.P.

Adapun tugas utama dari ketua pengurus melakukan control atau pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam menjaga kekayaan BTM BiMU dan memberikan arahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas BTM BiMU.

⁴ Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dicatat tanggal 15 Mei 2018 pukul 09:15 WIB.

- 2) Wakil ketua I : Elly Kasim, S.E.,Akt

Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam hal pengawasan dan pengembangan kemajuan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU.

- 3) Wakil Ketua II : Yuke Derli, S.Pd.I

Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam hal pengawasan dan pengembangan kemajuan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU.

- 4) Sekretaris : Ahsanal Huda, S.P.

Melakukan pengolahan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

- 5) Bendahara : Martini Setyowati, S.E.

Melakukan pengelolaan keuangan BTM BiMU secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

c. PENGELOLA

- 1) *General Manager* : Elly Kasim, S.E.,Akt

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung yang berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

2) Manager Ops dan Keuangan : Hj. Martini Sutriyowati, S.E

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BTM BiMU khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BTM BiMU.

3) Manager Area Lampung : Miftahudin, S.Pd.I.

Manager Area adalah anggota team dan sekaligus pimpinan team, Area Manager adalah anggota dari team management di kantor pusat dan pada saat yang sama Manager Area memimpin teamnya sendiri di Daerah, yaitu para Medical reps/ salesman / atau semua anggota di bawah tanggung jawabnya untuk membantu semua proses pencapaian target yang di bebaskan.

4) Kabag Ops dan Keuangan : Suprantia Ningsih

Melaksanakan seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BTM BiMU khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BTM BiMU.

5) Kabag IT : Sumarna, S.H.I

Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga serta teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga BTM BiMU.

6) Kabag Legal : Rahmat Habibi

Tugas kabag legal melakukan perjanjian kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan project perusahaan dimana ditempatkan, dan membuat surat permintaan, penawaran dan negoisasi harga.

7) Staff HRD : Dian Anggraini, S.Psi.

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitass dibidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas BTM BiMU.

8) Staff SE : Ari Rahman, S. Kom.

Berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas BTM BiMU

9) *Staff Legal* : Najamudin

Tugas dari staff legal mensupport dan mengelola dokumen perusahaan khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun legal contract. Mereview legal contract, perjanjian kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan project perusahaan dimana ditempatkan.

10) *Teller* : Dewi Utami

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

11) *Customer Service* : Heni Damayanti

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpun dana) yang dimiliki oleh BTM BiMU dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka).

12) *Office Boy* : Saproni

Tugas dari OB menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan, membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah, dan sewaktu-waktu bila dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman (kurir) dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

6. Alamat Kantor KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

a. Cabang Ahmad Dahlan. Jl. Ratu Dibalau, Way kandis - Bandar Lampung (0721-8011229)

- 1) Kantor Kas Way Kandis : Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Bandar Lampung
- 2) Kantor Kas Untung : Gg Persatuan, Labuhan Dalam, Tj Senang
- 3) Kantor Kas Way Halim : Jl. Gn Rajabasa Raya, Perumnas Way Halim
- 4) Kantor Kas Kota Karang : Jl. Laksamana RE Martadinata, Keteguhan, Teluk Betung Barat
- 5) Kantor Kas Tempel WH : Way Halim Permai, Bandar Lampung
- 6) Kantor Kas Gintung : Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung

- 7) Kantor Kas Koga : Jl. Teuku Umar, Sidodadi, Kedaton
 - 8) Kantor Kas Damar : Jl. Pulau Damar (Depan Masjid Tawakal),
Way Dadi Baru, Sukarame
 - 9) Kantor Kas Untung Stasiun : Pasar Untung Stasiun Kota Bandar
Lampung
 - 10) Kantor Kas Tugu : Pasar Tugu, Jl. Hayam Wuruk, Tj Karang
Bandar Lampung
 - 11) Kantor Kas Tempel Sukarame : Pasar Tempel Sukarame, Way
Dadi.
- b. Cabang Kh Mas Mansyur. Jl. Mess Pemda, Gisting Bawah,
Campang, Gisting, Kab. Tanggamus (082373556841)
- 1) Kantor Kas Gisting : Pasar Gisting Kabupaten Tanggamus
- c. Cabang Ki Bagus Hadikusumo Jl. Makam Kh. Gholib No. 112
Komplek Kampus STKIP Muhammadiyah, Pringsewu
(081273816116)
- 1) Kantor Cabang Pembantu : Jl. Hm GhardiI No 29, Ambarawa,
Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu
 - 2) Kantor Kas Pesawaran : Pasar Baru, Kedondong, Kabupaten
Pesawaran, Lampung

- d. Cabang Kh Ibrahim. Jl. Raya Pasar Patok, Sidoharjo, Way Panji, Lampung Selatan (085279090500)
- 1) Cabang Kh Badawi. Jl. Antilop IV Blok E1 No. 31, Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat (082306856095).

7. Tujuan Pembiayaan KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

Pembiayaan yang diberikan Baitut Tamwil Muhammadiyah kepada pengusaha mikro diberikan dalam rangka.⁵

- a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu tercapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul, resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan

⁵ Dokumentasi Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dicatat tanggal 15 Mei 2018 pukul 09:15 WIB.

demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan, sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (minus).

8. Produk - Produk KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

a. Bill Payment

1) Bill Payment

Bill Payment atau *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebar di seluruh jaringan kantor BTM Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam membayar tagihan-tagihan rutin bulanan: Tagihan PLN, Telkom, TV Kabel, BPJS, pembelian pulsa handphone hingga pembelian tiket pesawat.

b. Pembiayaan

1) Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BTM kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BTM kepada anggota untuk dikelola dalam usaha yang telah

disepakati bersama menggunakan akad *Mudharabah*. Dalam pembiayaan ini anggota dan BTM setuju untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh pihak BTM kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola/anggota, kelalaian dan penyimpangan pihak pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

2) *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha anggota dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati menggunakan akad *Musyarakah*.

3) *Murabahah*

Fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli yang menggunakan akad *Murabahah*. BTM Bandar Lampung akan membelikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi misalnya pembelian kendaraan bermotor, dll.

Ketentuan :

- a. Anggota dan BTM harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. BTM membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. BTM membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperasi sendiri dan pembelian ini harus sah serta bebas dari riba.
- e. BTM harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. BTM kemudian menjual barang tersebut kepada Anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.
- g. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka tertentu yang telah disepakati.
- h. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak BTM dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota.
- i. Jika BTM hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KSPPS.

- j. Pembelian barang oleh petugas BTM.
- k. Penyerahan barang dari petugas BTM kepada pihak anggota.

4) *Ijarah*

Fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad Ijarah. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

5) *Qard*

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (muqtaridh) yang memerlukan.

6) *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli dimana barang yang dibeli biasanya belum ada atau masih harus diproduksi. Dalam hal ini pembayaran atas barang dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan.

7) *Hawalah*

Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang-piutang, membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. BTM mendapat penggantian biaya yang timbul atas jasa pemindahan piutang. Sebagai contoh supplier jagung menjual barangnya kepada pemilik pabrik

pengolahan jagung yang akan dibayar dua minggu kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, ia meminta BTM untuk mengambil alih piutangnya.⁶

c. Simpanan

1) Si Muda Berjangka

Simpanan *Mudharabah* Berjangka (SMB) mengubah cara investasi anda dengan sesuatu yang lebih bermakna. Simpanan *Mudharabah* Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

2) Si Muda Tarbiyah

Simpanan *Mudharabah Tarbiyah* merupakan simpanan untuk keperluan biaya Pendidikan (Tarbiyah) dengan saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi yang bisa diambil per semester dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening ZIS (zakat, infak & sodakoh).

3) Si Muda Prestasi

Simpanan *Mudharabah* Prestasi adalah simpanan sekolah secara kolektif. Simpanan ini bertujuan untuk membantu anggota

⁶ “BTM” (On-Line) Tersedia: <http://btmbimu.id/> (17-April-2018 pukul 20:55 WIB)

melalui lembaga sekolahnya untuk mempersiapkan kebutuhan pada saat tahun ajaran baru dan penarikan simpanan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran.

4) Si Muda Qu

Simpanan *Mudharabah* Qurban merupakan simpanan untuk keperluan Ibadah Qurban dengan saldo awal Rp. 10.000,- Dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1 (satu) tahun sekali atau dua minggu (14 hari) sebelum hari raya Idul Adha, dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening ZIS (zakat, infak & sodakoh).

5) Si Muda Fitri

Simpanan *Mudharabah* Fitri merupakan simpanan berjangka 12 bulan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, dengan saldo awal Rp. 10.000,- Dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1 (satu) tahun sekali, dua minggu (14 hari) sebelum hari raya idul fitri dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening ZIS (zakat, infak & sodakoh).

6) Si Muda Umrah

Simpanan *Mudharabah* Umrah adalah Simpanan anggota untuk membantu keinginan anggota dalam melaksanakan ibadah Umrah.

7) Si WadU

Simpanan *Wadiah* Ummat adalah simpanan anggota yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

8) Si Wadu Personal

Simpanan *Wadiah* Personal merupakan simpanan dengan saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi jumlahnya serta bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan.

9) Si WaJi

Simpanan *Wadiah* Haji adalah Simpanan anggota untuk membantu keinginan anggota melaksakan ibadah Haji.⁷

⁷ “BTM” (On-Line) Tersedia: <http://btmbimu.id/> (17-April-2018 pukul 20:55 WIB)

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU

Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan konsumtif pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU berguna untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang-barang konsumtif, seperti: kendaraan, rumah, barang-barang elektronik dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pembiayaan konsumtif di BTM BiMU menggunakan akad *murabahah*. Pengertian pembiayaan *murabahah* adalah akad jual-beli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara BTM dan nasabah. Di dalam BTM BiMU, objek pembiayaan *murabahah* ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggotanya seperti: pembelian kendaraan, rumah, barang-barang elektronik dan pengadaan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini antara BTM BiMU dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjual belikan harus halal dan bermanfaat. BTM BiMU harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimuali dengan minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, margin keuntungan yang diperoleh BTM BiMU, jaminan atas nasabah, dan lamanya angsuran yang wajib diselesaikan oleh nasabah.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Rahmat Habibi, Kabag Legal KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 2018.

Gambar 4.1**Bagan Alur Pembiayaan *Murabahah***

Sumber: Dokumentasi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 2018.

Keterangan:

1. Calon anggota datang ke KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU yang terletak di setiap pasar kota Bandar Lampung atau bisa menghubungi pihak marketing baik melalui telepon maupun langsung untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Menerangkan pembiayaan konsumtif, selama menerangkan nasabah diberi formulir pengajuan akad pembiayaan konsumtif, menjekaskan syarat-syarat pengajuan, jaminan, margin yang ditawarkan oleh BTM 0-20% atau sesuai dengan kemampuan nasabah, dan dalam jangka waktu 115 hari atau sesuai kesepakatan bersama. Dan jaminan yang harus disertkan oleh nasabah yakni minimal senilai dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan. Pihak BTM BiMU juga menjelaskan di awal maksud kugunaan disertkan jaminan pada BTM BiMU yaitu untuk mencegah kecurangan nasabah, dan sebagi asset penentu yang mampu menyelamatkan nasabah apabila nantinya tidak dapat mengangsur atau bermasalah.
3. Setelah semua dijelaskan dengan detail oleh pihak BTM BiMU dan anggota juga sudah menyetujuinya maka tindakan selanjutnya yakni inisiasi. Tugas penting dari inisiasi ialah sebagai berikut:
 - a. Mengecek kelengkapan berkas persyaratan dan kelengkapan jaminan anggota. Kelengkapan berkas yang wajib dilengkapi sebagai berikut:
 - 1) Formulir pengajuan pembiayaan
 - 2) Fotocopy KTP suami dan istri (bagi yang sudah menikah)

- 3) Fotocopy kartu keluarga dan suat nikah
 - 4) Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum menikah)
 - 5) Surat keterangan domisili apabila permohonan bertempat tinggal tidak menetap
 - 6) Peta lokasi rumah
 - 7) Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan bermaksud untuk pembelian suatu barang.
- b. Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindak lanjut, maka dari peta lokasi yang diberikan calon nasabah di atas, pihak BTM BiMU melakukan survey lapangan guna menganalisa layak tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan konsumtif. Ketika survey lapangan pihak BTM menggunakan prinsip 5C yaitu:
- 1) *Character* (Watak / kepribadian)

Menganalisis penilaian karakter atau kepribadian seseorang. Jika pihak yang dibiayai memiliki kepribadian yang baik maka pihak BTM BiMU akan lebih percaya untuk mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Karena kepercayaan dalam hal ini sangatlah penting. Pada BTM BiMU ini menilai karakter anggota atau calon anggota dengan cara melihat usia, pendidikan, kesehatan, status perkawinan, pergaulan sosial. Selain itu pihak BTM BiMU melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang mengenalnya. Baik itu keluarga,

saudara, ataupun pihak tetangga atau warga disekitar tempat tinggal.

2) *Capacity* (Kemampuan membayar)

Capacity merupakan analisa kemampuan calon anggota, bisa dilakukan dengan melihat dari unsur penghasilan atau pendapatan nasabah dari profesi atau pekerjaannya sehingga nasabah mampu memenuhi kewajibannya secara rutin kepada Bank sampai jangka waktu yang ditentukan atau disepakati. Dalam proses verifikasi kondisi keuangan calon pembiayaan, disini pihak BTM menilai *Capacity* dengan cara: verifikasi omset usaha, verifikasi penyediaan stok bahan baku, verifikasi transaksi usaha, verifikasi kebutuhan rumah tangga.

Penilaian ini guna melihat kemampuan anggota untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang nanti akan dapat digunakan untuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh BTM BiMU kepada anggotanya. Dan juga bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya.

3) *Capital* (Harta yang dimiliki)

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan keyakinan calon anggota terhadap usahanya sendiri. Jika calon anggota sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Dan dapat dilihat juga apakah anggota tersebut memiliki simpanan di BTM termasuk simpanan di lembaga

keuangan lain, dan apakah memiliki penghasilan tetap untuk membayar angsuran.

4) *Condition* (Kondisi usaha)

Dalam penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon anggota yang akan dibiayai. Aspek tersebut sangat menentukan BTM dalam memutuskan apakah pembiayaan layak atau tidak layak untuk diberikan kepada anggota dengan harapan bahwa pembiayaan yang diberikan benar dan tepat sasaran.

5) *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Merupakan jaminan berupa barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai jaminan bagi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan konsumtif pada BTM. Jaminan yang diberikan sesuai dengan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Jaminan yang diberikan calon anggota biasanya berupa tanah, bangunan, BPKB (mobil atau motor), dan barang yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analisis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika terjadi suatu risiko kegagalan dalam pembayaran pembiayaan, maka jaminan dipakai

untuk pengganti dari kewajibannya. Nilai jual jaminan harus bisa menutupi pembiayaan serta bagi hasil atau marginnya. Dan apabila nilai jaminan lebih, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.²

BTM BiMU juga menerapkan syarat jaminan Pembiayaan seperti: Aspek Ekonomis dimana jaminan yang diberikan dapat diperjual belikan secara umum dan bebas, Nilainya lebih besar dibandingkan pembiayaannya, nilainya stabil dan cenderung naik, kondisi dan lokasi jaminan strategis, dan manfaat ekonominya lebih panjang. Selain itu juga ada Aspek Yuridis dimana segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah seperti: tidak dalam sengketa, benar-benar milik pihak yang bersedia menjaminkan, memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta mempunyai kekuatan hukum, jaminan dalam kondisi bebas (tidak dipakai sebagai fasilitas umum).

4. Apabila survey telah dilakukan oleh pihak BTM BiMU, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika rapat komite. Dan apabila dinyatakan layak, maka pihak BTM menelepon nasabah untuk melakukan akad dihari yang telah ditentukan oleh BTM BiMU. Di dalam pertemuan tersebut komite BTM BiMU dan anggota melakukan negoisasi dimulai total pinjaman nasabah yang kadang tidak dapat diberikan BTM BiMU secara utuh

² Wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Pd.I., Manager Area Lampung KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU, 24 Mei 2018.

sesuai pengajuan, negoisasi margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang lebih kecil dari penawaran BTM BiMU, serta membahas mengenai lamanya angsuran yang disanggupi anggota dan tidak merugikan BTM BiMU.

5. Apabila titik kesepakatan telah dicapai oleh BTM BiMU dan anggota, maka BTM BiMU memberikan berkas berupa surat atas jaminan yang harus diisi anggota saat itu juga dengan materai sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki oleh anggota untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.
6. Pada hari yang sama pula, uang diberikan kepada anggota untuk melakukan pembelian barang yang diajukan anggota.
7. Keesokan harinya, anggota wajib mendatangi kembali kantor BTM BiMU dengan menyerahkan berkas berupa bukti kwitansi atau bukti pelunasan atas pembelian barang yang sesuai dengan akad diawal.
8. Apabila semua urusan telah selesai, pihak BTM BiMU akan memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar anggota sesuai kesepakatan apakah perhari atau perminggu asalkan dalam 1 bulan harus cukup.

Berdasarkan mekanisme yang telah dijelaskan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme atau prosedur pemberian pembiayaan yang ada di BTM BiMU sudah sesuai dengan standar yang ada dan tidak jauh berbeda dengan teori yang ada. Hanya yang menjadi pembeda terletak pada persyaratan dalam pengajuannya dan ukuran yang ditetapkan oleh BTM BiMU sesuai dengan pertimbangan.

Dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan diberlakukannya prinsip kahati-hatian, bertujuan agar mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah diperlukan penilaian kelayakan suatu pembiayaan, apakah pembiayaan tersebut berhak disetujui ataupun ditolak. Tahap ini sangat penting dalam lembaga keuangan, agar terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. Selain itu menilai kelayakan berguna untuk meyakinkan pihak BTM BiMU agar pembiayaan yang dicairkan nantinya akan dikembalikan dengan semestinya tanpa adanya halangan.

B. Pembiayaan Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dalam KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU pembiayaan adalah usaha, kepemilikan kendaraan, tempat tinggal, ataupun kebutuhan temporer dan lain sebagainya dengan pengembalian diangsur dalam jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip syariah agama Islam.

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan (pribadi). Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan karyawan di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU dikatakan bahwa pembiayaan konsumtif tidak mengandung unsur riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (tidak jelas kualitasnya) dan sesuai dengan syariat Islam.

Landasan hukum Islam tentang pembiayaan tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).*

Dalam surat di atas Allah SWT menerangkan mengenai dibolehkannya berjual beli dan larangan riba karena maslahat jual beli yang merata baik bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionisasikan dalam praktik pembiayaan BTM karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba. Transaksi jual beli menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksi jual beli terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi jual beli selain itu dalam transaksi jual beli ada suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan.

Dalam hal pemberian pembiayaan konsumtif, BTM juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali dana yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

1. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
2. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)
3. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
4. Pembiayaan Konsumen Akad *Istisha*
5. Pembiayaan Konsumen Akad *Qard* dan *Ijarah*

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna'*.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan konsumtif di BTM BiMU menggunakan akad *murabahah*. Pengertian pembiayaan *murabahah*, merupakan jual-beli barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Menurut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* yaitu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*. Dalam Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU, objek pembiayaan konsumtif akad *murabahah* dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggotanya seperti: pembelian rumah, kendaraan, elektronik, dan pengadaan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam

Antara Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bermanfaat. Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimuali dengan minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, margin keuntungan yang diperoleh Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU, jaminan atas nasabah, dan lamanya angsuran yang wajib diselesaikan oleh nasabah.

Transaksi dalam pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang menjadi pihak penjual yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU, pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU merupakan perantara antara pembeli dengan *supplier* dan yang mengurus segala transaksi seperti kriteria barang apa yang diinginkan anggota, jenis barangnya dan segala hal yang berkaitan dengan permintaan anggota sesuai dengan kesepakatan antara BTM dan anggota.

Menurut peneliti penerapan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang ada di BTM BiMU sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari *gharar* dan *syubhat*. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau samar-samar dan di luar jangkauan termasuk dalam jual beli *gharar* dan *syubhat*. Dilarangnya *gharar* karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Oleh sebab itu pihak BTM sangat melarang transaksi yang *gharar* dan *syubhat*. Dari hasil wawancara peneliti di BTM BiMU didalam menentukan harga jual dan margin keuntungan dalam hal ini pihak BTM menjelaskan secara transparan kepada calon anggota. Berapa harga awal dan berapa juga margin yang di dapat oleh BTM. Margin yang di tetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan BTM untuk pembiayaan *murabahah* yaitu sekitar 1,5%-3,5%.³ Menurut peneliti penerapan yang dilakukan oleh BTM sudah baik, terdapat proses *Ijab* dan *Qabul* antara BTM dan anggota. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *murabahah* yang ada. BTM BiMU juga adalah salah satu lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang unggul.

Prinsip ekonomi yang ada di BTM dengan prinsip ekonomi Islam tidak jauh berbeda dilihat dari *Character* dalam analisis 5C, Allah SWT melalui Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup yang baik dan benar didunia. Apabila *character* atau watak anggota sudah bagus *insyaAllah* pembiayaan yang akan diberikan berjalan lancar, meskipun calon anggota memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, namun

³ Wawancara dengan Bapak Miftahudin, S.Pd.I., Manager Area Lampung KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU, 02 Juli 2018.

anggota tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, namun anggota tidak memiliki niat untuk menyelesaikan kewajibannya, tentu akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Selain itu pihak BTM juga bisa dengan cara cek riwayatnya di Bank Indonesia atau BI checking. Bagi anggota yang memiliki catatan tidak baik, BTM akan menolak pembiayaan yang diajukannya.

Capacity, yaitu kemampuan seseorang dalam membayar hutang. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa haram bagi seseorang mengambil harta orang lain (berhutang) namun dia tidak memiliki niat, motivasi, dan usaha untuk mengembalikannya. Membayar hutang adalah kewajiban bagi setiap yang berhutang. Dan tidak dibenarkan bagi orang yang mampu untuk menunda-nunda dalam membayar hutangnya. Islam menganjurkan untuk memberikan kemudahan yang berhutang untuk memberikan tangguh bagi yang kesusahan serta menghapuskannya. Jika seorang nasabah tidak menunaikan kewajibannya padahal ia sanggup untuk membayarnya maka Allah akan mengambil haknya.

Capital, adapun dalam istilah syar'i harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum Islam seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya modal yang artinya “tidak boleh iri selain kepada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain”.

Condition atau kondisi ekonomi nasabah. Dalam Islam seorang pebisnis wajib untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Setiap individu diberi kebebasan untuk bekerja di bumi Allah SWT ini karena setiap manusia sudah diberikan kebebasan dalam mencari rezeki dan memperhatikan kelangsungan usaha sehingga memberikan dampak baik pada kondisi keuangan dan kesejahteraan keluarganya. Peran pemerintah dalam perekonomian terkadang memberikan dampak tersendiri bagi pelaku bisnis. Seorang pebisnis hendaknya menghindari bisnis-bisnis yang dilarang oleh Allah SWT maupun pemerintah, sehingga kelangsungan bisnis tetap terjaga.

Collateral atau jaminan dalam ekonomi Islam sama dengan *Rahn*. Juga berarti sebagai al-habs harta yang dijadikan jaminan hutang (pinjaman). Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan transaksi. Manfaat adanya jaminan adalah sebagai alat pengaman apabila anggota mengalami masalah sehingga anggota tidak dapat melunasi kewajibannya. Selain itu, jaminan adalah sebagai pengaman apabila terjadi ketidakpastian pada saat pembiayaan tersebut harus dilunasi.

Syariah, penilaian terhadap objek pembiayaan ini dilakukan agar tidak terjadi transaksi yang cacat dikarenakan objek pembiayaannya tidak sesuai syariah Islam seperti peternakan babi, dan sebagainya. diterapkan untuk melihat bidang usaha calon anggota yang mengajukan. BTM hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya dan BTM juga tidak membiayai barang yang secara agama dilarang.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang dijalankan BTM BiMU sudah sesuai dengan prinsip ekonomi. BTM tidak membiayai barang yang secara agama dilarang. Dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan dalam hal ini pihak BTM menjelaskan secara transparan kepada calon anggota. Berapa harga awal dan berapa juga margin yang di dapat oleh BTM. Penerapan yang dilakukan oleh BTM sudah baik, terdapat proses *Ijab* dan *Qabul* antara BTM dan anggota. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *murabahah* yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan Konsumtif di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya. Pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU menggunakan akad *murabahah*. Dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BTM BiMU menggunakan prinsip 5C. Dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek yuridis.
2. Pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang dijalankan BTM BiMU sudah sesuai dengan prinsip ekonomi, dan sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan tersebut, di antaranya:

- Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:
1. Kepada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung:

- a. KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung hendaknya harus memberikan pengawasan dalam mempertahankan atau lebih baik lagi.
 - b. Diharapkan pihak BTM BiMU bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Semakin ditingkatkan lagi promosi produk serta pengenalan tentang BTM BiMU agar lebih dikenal masyarakat.
2. Kepada para akademis,
- a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan variable yang berbeda agar dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Thamrin, dan Tantri, Francis. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kharisma Putrautama Offset.
- Adirahman A, dan Karim S. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Ahmad, dan Santoso, Ananda. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- K. Lubis, Suhrawadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rivai, Veithzal, dan Veithzal, Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, et.al. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Tori Ke Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Rivai, Veithzal. Veithzal, Andria Permata, dan Ferry N. 2007 *Bank And Financial Institution Management*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Sangadji, Etta Mamang Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Thomas. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Teguh, Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Triandaru, Sigit, dan Budisantoso, Totok. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usanti, Trisadini P, dan Shomad, Abd. 2012. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wangsa widjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yaya, Rizal, et.al. 2014. *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Jurnal:

- Rizky Maulana Pribadi, Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Liquidity*. 2017.

Skripsi:

- Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang), *skripsi*, 2016.

Irkhalia Zakiyani, Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang), *skripsi*, 2015.

Firman Farhani, Analisis kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat). *Skripsi*. 2015.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
2. Apa visi dan misi KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
3. Produk-produk apa saja yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
5. Apa saja syarat dalam pengajuan pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
6. Akad apa yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumtif di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
7. Apa sajakah yang menjadi penilaian KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung terhadap calon anggota pembiayaan konsumtif ?
8. Bagaimana cara menganalisa pembiayaan pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?
9. Bagaimana cara mengatasi jika ada pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung ?